

---

## PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM): PERSPEKTIF KARYAWAN DAN PEMILIK USAHA

Agustina Sadri Yathy Lay<sup>1)</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Oemathonis<sup>1)</sup>  
Jl. Frans Seda, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 85228

e-mail: [sadriagustina@gmail.com](mailto:sadriagustina@gmail.com)<sup>1)</sup>

---

### ABSTRAK

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya manusia, termasuk pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki karakteristik kerja berisiko dan sistem manajemen yang terbatas. Permasalahan utama dalam UMKM adalah belum optimalnya penerapan K3 akibat keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi K3, serta perbedaan persepsi antara pemilik usaha dan karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan K3 pada UMKM dari perspektif karyawan dan pemilik usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi langsung pada UMKM di Ruteng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan K3 pada UMKM masih bersifat informal dan belum terstruktur, di mana pemilik usaha memandang K3 sebagai praktik kehati-hatian sederhana, sedangkan karyawan memandang K3 sebagai kebutuhan perlindungan kerja yang belum terpenuhi secara optimal. Perbedaan perspektif tersebut menimbulkan kesenjangan dalam praktik K3 dan berimplikasi pada kenyamanan kerja serta keberlanjutan usaha.

**Kata kunci:** Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, UMKM, Pemilik Usaha, Karyawan.

### ABSTRACT

*Occupational safety and health (OSH) is a crucial aspect of human resource management, including in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), which are characterized by work-related risks and limited managerial systems. A major issue in MSMEs is the suboptimal implementation of OSH due to limited resources, low OSH literacy, and differing perceptions between business owners and employees. This study aims to analyze the implementation of OSH in MSMEs from the perspectives of business owners and employees. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through in-depth interviews and direct observations of MSMEs in Ruteng. The findings indicate that OSH implementation in MSMEs remains informal and unstructured, where business owners perceive OSH as basic precautionary practices, while employees view OSH as an essential form of protection that has not been adequately fulfilled. These differing perspectives create gaps in OSH practices and have implications for work comfort and business sustainability.*

**Keywords:** Occupational Safety and Health, Msmes, Business Owners, Employees.

---

### PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena menjadi penyerap tenaga kerja terbesar serta penggerak aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Peningkatan produktivitas UMKM tidak hanya ditentukan oleh aspek modal dan pemasaran, tetapi juga oleh pengelolaan sumber daya manusia yang aman dan sehat (Arfiana & Fanika, 2023). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian integral dari manajemen usaha yang bertujuan melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sekaligus menjaga keberlangsungan operasional usaha. Dalam konteks UMKM, penerapan K3 sering kali dipersepsikan sebagai beban tambahan, bukan sebagai investasi jangka panjang, sehingga implementasinya belum menjadi prioritas utama. Padahal, lingkungan kerja yang aman dan sehat berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja, loyalitas pekerja, dan stabilitas usaha. Oleh karena itu, kajian mengenai

penerapan K3 pada UMKM menjadi penting untuk memahami sejauh mana kesadaran, sikap, dan praktik K3 dijalankan oleh pelaku usaha dan dirasakan oleh karyawan.

Fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih menjalankan aktivitas produksi dan pelayanan dengan standar keselamatan kerja yang minim. Banyak pekerja UMKM bekerja tanpa alat pelindung diri yang memadai, tanpa prosedur kerja tertulis, serta tanpa pelatihan keselamatan yang sistematis. Dari sisi pemilik usaha, K3 kerap dianggap tidak mendesak karena skala usaha yang kecil, jumlah pekerja terbatas, dan hubungan kerja yang bersifat kekeluargaan (Wardasyifa, 2024). Kondisi ini menimbulkan kesenjangan persepsi antara pemilik usaha dan karyawan, di mana pemilik merasa lingkungan kerja sudah cukup aman, sementara karyawan tetap menghadapi risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan. Fenomena tersebut semakin kompleks ketika UMKM bergerak di sektor dengan risiko kerja tinggi, seperti makanan dan minuman, manufaktur rumahan, bengkel, atau jasa konstruksi skala kecil. Ketidakhadiran sistem K3 yang terstruktur menjadikan risiko kerja dipandang sebagai hal yang wajar dan tidak terelakkan, sehingga upaya pencegahan cenderung diabaikan.

Berbagai laporan dan temuan empiris menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan di sektor informal, termasuk UMKM, masih relatif tinggi dibandingkan sektor formal (Firman Isnaini, 2022). Pekerja UMKM sering mengalami cedera ringan hingga sedang, kelelahan kerja, serta paparan bahan berbahaya tanpa perlindungan yang memadai. Data pengawasan ketenagakerjaan juga menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum memiliki standar operasional prosedur keselamatan kerja dan belum terdaftar dalam program jaminan kecelakaan kerja secara optimal. Selain itu, rendahnya literasi K3 di kalangan pemilik UMKM menyebabkan kurangnya investasi pada alat keselamatan, pengaturan lingkungan kerja, dan pemeriksaan kesehatan pekerja (Rifani et al., 2018). Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pekerja dalam bentuk risiko keselamatan, tetapi juga oleh pemilik usaha melalui menurunnya produktivitas, meningkatnya absensi, dan potensi kerugian usaha akibat gangguan operasional. Data tersebut mengindikasikan adanya masalah struktural dalam penerapan K3 di UMKM yang perlu dikaji secara komprehensif dari sudut pandang kedua belah pihak.

## 1. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan K3 memiliki hubungan positif dengan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan, namun implementasinya di UMKM masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian menemukan bahwa rendahnya penerapan K3 pada UMKM disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan pemilik usaha dan minimnya pengawasan dari pihak terkait, sehingga keselamatan kerja belum menjadi budaya organisasi (Parinduri & Parinduri, 2021). Studi lain mengungkapkan bahwa karyawan UMKM cenderung menerima kondisi kerja berisiko karena faktor kebutuhan ekonomi, meskipun menyadari potensi bahaya yang dihadapi (Arfiana & Fanika, 2023). Penelitian oleh (Wardasyifa, 2024) menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara pemilik dan karyawan terkait tingkat keamanan lingkungan kerja, di mana pemilik menilai kondisi kerja sudah memadai, sedangkan karyawan menilai masih banyak aspek keselamatan yang terabaikan. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa masalah K3 di UMKM tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor persepsi, sikap, dan kesadaran para pelaku usaha.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan dual perspective yang secara simultan mengkaji penerapan K3 dari sudut pandang karyawan dan pemilik usaha UMKM. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek kepatuhan atau kondisi objektif lingkungan kerja, penelitian ini menekankan pada perbandingan persepsi, pengalaman, dan pemaknaan K3 oleh kedua pihak. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kesenjangan persepsi yang selama ini menjadi akar lemahnya implementasi K3 di UMKM. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengaitkan persepsi K3 dengan implikasinya terhadap keberlanjutan usaha, sehingga K3 tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif, tetapi sebagai strategi manajerial yang bernilai ekonomis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan model penerapan K3 yang kontekstual dan realistis bagi UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada UMKM dengan meninjau persepsi dan pengalaman karyawan serta pemilik usaha. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi tingkat kesadaran dan pemahaman K3 di kalangan pemilik UMKM, menggambarkan kondisi keselamatan dan kesehatan kerja yang dirasakan oleh karyawan, serta menganalisis kesenjangan persepsi antara kedua pihak. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi penerapan K3 di UMKM serta implikasinya terhadap kenyamanan kerja, produktivitas, dan keberlanjutan usaha. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan rekomendasi strategis bagi pelaku UMKM dan pemangku kebijakan dalam mendorong penerapan K3 yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan usaha.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari perspektif karyawan dan pemilik usaha (Sugiono, 2019). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara komprehensif persepsi, pengalaman, serta pemaknaan subjek penelitian terhadap praktik K3 yang dijalankan dalam aktivitas kerja sehari-hari. Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM Rumah Makan Chaca Ruteng yang beralamat di Jl. Diponegoro No.12, Watu, Kec. Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, yang bergerak dalam bidang Kuliner, dengan potensi risiko kerja, seperti produksi, pengolahan, dan jasa, yang berlokasi di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Teknik pengumpulan data utama yang digunakan meliputi wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap kondisi lingkungan kerja. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran kontekstual mengenai bagaimana K3 dipahami, diterapkan, dan dirasakan oleh para pelaku UMKM dalam realitas kerja sehari-hari.

**Tabel 1.** Informan Penelitian UMKM Rumah Makan Chacha Ruteng

<b>Kode Informan</b>	<b>Kategori Informan</b>	<b>Jabatan/Peran</b>	<b>Keterangan</b>
IF 1	Pemilik UMKM	Pemilik Usaha	Bertanggung jawab atas pengelolaan usaha serta pengambilan keputusan terkait kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja
IF 2	Pemilik UMKM	Pemilik Usaha	Menentukan sistem kerja, penyediaan alat kerja, dan pengaturan lingkungan kerja
IF 3	Karyawan UMKM	Pekerja Operasional	Terlibat langsung dalam proses kerja dan merasakan risiko keselamatan serta kondisi kesehatan kerja
IF 4	Karyawan UMKM	Pekerja Operasional	Memiliki pengalaman langsung terkait praktik K3 dan potensi bahaya di tempat kerja
IF 5	Karyawan UMKM	Pekerja Operasional	Menjadi representasi persepsi pekerja terhadap penerapan K3 oleh pemilik usaha

**Sumber:** Data diolah penulis (2026).

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria memiliki keterlibatan langsung dalam aktivitas kerja dan pemahaman terhadap kondisi operasional UMKM. Pemilik UMKM dipilih karena memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan dan kebijakan K3, sementara karyawan dipilih untuk merepresentasikan pengalaman nyata terkait risiko kerja, perlindungan keselamatan, dan kondisi kesehatan kerja yang dirasakan sehari-hari. Apabila terdapat pengelola atau koordinator operasional, informan ini dilibatkan untuk memperkuat perspektif manajerial antara pemilik dan karyawan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola persepsi, kesenjangan pandangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan K3 di UMKM

(Creswell & Creswell, 2023). Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga temuan penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan relevan sebagai dasar perumusan rekomendasi penerapan K3 yang kontekstual dan aplikatif bagi UMKM (Creswell & Creswell, 2018).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi penelitian ini berada di Ruteng, yang merupakan ibu kota Kabupaten Manggarai di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, serta aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Ruteng memiliki karakteristik wilayah perkotaan berkembang dengan dominasi UMKM yang bergerak di sektor produksi rumah tangga, pengolahan pangan, jasa, dan perdagangan kecil, yang sebagian besar dikelola secara mandiri dan berbasis keluarga. Aktivitas kerja pada UMKM di wilayah ini umumnya masih bersifat sederhana dengan keterbatasan sarana, prasarana, serta penerapan standar kerja formal, termasuk dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mengandalkan UMKM sebagai sumber mata pencaharian utama menjadikan isu K3 relevan untuk dikaji, karena pekerja dan pemilik usaha sering berinteraksi langsung dengan risiko kerja dalam lingkungan yang belum sepenuhnya terstandarisasi. Oleh karena itu, Ruteng dipandang sebagai lokasi yang representatif untuk memperoleh gambaran empiris mengenai penerapan K3 pada UMKM dari perspektif karyawan dan pemilik usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada UMKM di Ruteng masih berada pada tahap dasar dan belum terstruktur secara sistematis. Dari hasil wawancara dan observasi lapangan, terlihat bahwa pemahaman dan praktik K3 sangat dipengaruhi oleh persepsi pemilik usaha, keterbatasan sumber daya, serta budaya kerja yang berkembang di lingkungan UMKM. Pemilik usaha cenderung memaknai K3 secara sederhana sebagai upaya menghindari kecelakaan berat, sementara karyawan memaknai K3 sebagai kebutuhan perlindungan kerja yang lebih luas, mencakup keselamatan fisik, kenyamanan kerja, dan kesehatan jangka panjang. Perbedaan cara pandang ini membentuk pola penerapan K3 yang bersifat informal dan situasional.

Dari sudut pandang pemilik usaha, penerapan K3 lebih banyak didasarkan pada pengalaman pribadi dan logika praktis dibandingkan standar atau prosedur tertulis. IF 1 mengungkapkan bahwa selama ini belum pernah menyusun aturan khusus terkait K3 karena merasa skala usaha masih kecil dan risiko kerja dapat dikendalikan secara langsung. IF 1 menyatakan, "Kalau di sini belum ada aturan tertulis soal keselamatan kerja, karena kami anggap masih usaha kecil, jadi saya rasa cukup dengan saling mengingatkan supaya hati-hati waktu kerja." Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemilik usaha mengandalkan komunikasi informal dan pengawasan langsung sebagai bentuk pengendalian risiko kerja, tanpa didukung sistem K3 yang terencana.

IF 2 menilai bahwa penerapan K3 selama ini dilakukan sebatas penyediaan alat kerja yang dianggap aman menurut persepsi pemilik. IF 2 menyatakan, "Saya pikir yang penting alat kerjanya layak dan tidak rusak, jadi kalau alatnya masih bagus ya sudah aman." Pemaknaan K3 yang terbatas pada kondisi alat kerja menunjukkan bahwa aspek lain seperti prosedur kerja aman, penggunaan alat pelindung diri, serta pengaturan lingkungan kerja belum menjadi perhatian utama. Pemilik usaha cenderung menilai risiko kerja sebagai sesuatu yang dapat diterima dan merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari.

Dari sudut pandang karyawan menunjukkan bahwa pemahaman K3 yang lebih dekat dengan pengalaman langsung menghadapi risiko kerja. IF 3 mengungkapkan bahwa dalam aktivitas kerja sehari-hari, risiko kecelakaan kecil sering terjadi dan dianggap sebagai hal biasa. IF 3 menyatakan, "Kalau luka kecil atau tangan kena alat itu sudah sering, biasanya cuma dibilang hati-hati saja, tidak ada alat khusus." Pernyataan ini menunjukkan bahwa karyawan menyadari adanya risiko kerja, namun tidak memiliki perlindungan yang memadai untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut.

IF 4 menambahkan bahwa meskipun menyadari pentingnya keselamatan kerja, karyawan sering kali tidak berani menyampaikan keluhan karena khawatir dianggap merepotkan pemilik

usaha. IF 4 menyatakan, “Sebenarnya kami tahu kerja ini berisiko, tapi jarang bicara soal itu, takut dikira banyak tuntutan.” Temuan ini menunjukkan adanya relasi kerja yang bersifat hierarkis dan kekeluargaan, yang secara tidak langsung membatasi komunikasi terbuka mengenai K3. Kondisi ini memperkuat budaya kerja yang cenderung menerima risiko sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi karyawan.

Sementara itu, IF 5 menyoroti aspek kesehatan kerja yang sering terabaikan, terutama terkait kelelahan dan dampak jangka panjang dari pekerjaan. IF 5 menyatakan, “Kalau capek atau badan sakit biasanya istirahat sendiri, tidak ada pemeriksaan kesehatan atau aturan jam kerja yang jelas.” Pernyataan ini mengindikasikan bahwa aspek kesehatan kerja belum terintegrasi dalam sistem pengelolaan UMKM. Kesehatan pekerja masih dianggap sebagai urusan individu, bukan sebagai tanggung jawab bersama antara pemilik dan pekerja.

Berdasarkan hasil observasi dan temuan wawancara, sebagian besar UMKM belum memiliki alat pelindung diri yang memadai dan lingkungan kerja masih minim pengaturan keselamatan. Area kerja sempit, ventilasi kurang optimal, serta penataan alat kerja belum mempertimbangkan aspek ergonomi dan keselamatan. Namun, terdapat upaya spontan dari pemilik usaha untuk mengurangi risiko kerja melalui pengawasan langsung dan pembagian tugas secara sederhana, meskipun belum berbasis standar K3 yang jelas.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi pemilik dan karyawan dalam memaknai penerapan K3 di UMKM. Pemilik usaha cenderung melihat K3 sebagai upaya tambahan yang bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan usaha, sementara karyawan memandang K3 sebagai kebutuhan perlindungan kerja yang penting namun belum terpenuhi secara optimal. Kesenjangan ini menyebabkan penerapan K3 berjalan secara informal, reaktif, dan bergantung pada kesadaran individu, bukan sebagai sistem manajerial yang terintegrasi. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan K3 di UMKM tidak hanya membutuhkan peningkatan fasilitas, tetapi juga perubahan pola pikir dan kesadaran bersama antara pemilik usaha dan karyawan.

#### **4.1. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada UMKM dari Perspektif Pemilik Usaha.**

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada UMKM dari perspektif pemilik usaha menunjukkan bahwa posisi K3 dalam praktik manajerial UMKM masih berada pada level perifer dan belum menjadi bagian inti dari sistem pengelolaan usaha. Berdasarkan hasil penelitian, pemilik UMKM cenderung memaknai K3 sebagai tindakan kehati-hatian dasar yang bersifat praktis dan spontan, bukan sebagai sistem pencegahan risiko yang terstruktur. Kajian ini membentuk praktik K3 yang informal, fleksibel, dan sangat bergantung pada pengalaman pribadi pemilik usaha. Pemilik memosisikan diri sebagai pengawas langsung yang merasa mampu mengendalikan risiko kerja melalui pengamatan kasat mata dan instruksi verbal sederhana. Konsekuensinya, K3 tidak dilembagakan dalam bentuk kebijakan tertulis, prosedur baku, maupun mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Pola ini memperlihatkan bahwa K3 dipahami lebih sebagai respons terhadap potensi bahaya yang terlihat, bukan sebagai upaya sistematis untuk mengantisipasi risiko laten yang bersifat jangka panjang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Amanda et al., 2024) yang menyatakan bahwa pemilik UMKM umumnya menempatkan K3 sebagai aspek operasional tambahan yang tidak terpisah dari kebiasaan kerja sehari-hari. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa skala usaha yang kecil mendorong pemilik untuk mengelola risiko kerja secara informal karena merasa mampu mengendalikan langsung aktivitas pekerja. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa pemaknaan K3 yang bersifat personal dan kontekstual bukanlah fenomena lokal semata, melainkan pola umum dalam pengelolaan UMKM. Hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa lemahnya penerapan K3 pada UMKM bukan semata-mata disebabkan oleh ketidakpedulian, tetapi oleh konstruksi makna K3 yang masih terbatas pada pengalaman empiris pemilik usaha.

Berdasarkan sudut pandang pemilik usaha, keterbatasan sumber daya menjadi alasan utama mengapa K3 belum diprioritaskan secara formal. Pemilik UMKM menghadapi tekanan untuk menjaga keberlangsungan usaha di tengah keterbatasan modal, fluktuasi

permintaan, dan ketergantungan pada tenaga kerja yang jumlahnya terbatas. Dalam situasi ini, investasi pada K3 sering dipersepsikan sebagai biaya tambahan yang tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan. Perspektif ini selaras dengan penelitian yang menyatakan bahwa pemilik UMKM cenderung mengadopsi strategi bertahan hidup (survival strategy), di mana keputusan manajerial lebih difokuskan pada aspek yang dianggap langsung berkontribusi terhadap kelangsungan usaha. K3 dalam konteks ini ditempatkan sebagai kebutuhan sekunder yang baru diperhatikan ketika terjadi insiden kerja yang signifikan (Puspayanti et al., 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa logika ekonomi pemilik UMKM justru menyimpan paradoks. Ketika K3 diabaikan, risiko gangguan operasional menjadi lebih besar karena kecelakaan kerja, kelelahan karyawan, atau gangguan kesehatan dapat menurunkan produktivitas dan meningkatkan absensi. Dalam skala UMKM, kehilangan satu tenaga kerja saja dapat berdampak signifikan terhadap kelancaran produksi. Hal ini menunjukkan bahwa pemaknaan K3 sebagai “biaya” merupakan kesalahpahaman manajerial, karena dalam jangka panjang K3 justru berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap stabilitas usaha (Ayu & Dalimunthe, 2023). Temuan ini menguatkan argumen bahwa rendahnya penerapan K3 pada UMKM lebih disebabkan oleh keterbatasan perspektif strategis pemilik usaha, bukan semata keterbatasan finansial.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemilik UMKM cenderung mereduksi konsep K3 pada aspek kelayakan alat kerja. Selama alat dianggap masih layak digunakan, risiko kerja dipersepsikan sebagai terkendali. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman K3 yang berfokus pada aspek teknis semata dan mengabaikan dimensi manusia serta lingkungan kerja. Padahal, risiko kerja dalam UMKM sering kali muncul dari kombinasi faktor, seperti cara penggunaan alat, durasi kerja yang panjang, postur kerja yang tidak ergonomis, serta kondisi ruang kerja yang kurang mendukung Kesehatan (Setiawan & Nurcahyanto, 2020). Kecenderungan pemilik untuk memusatkan perhatian pada alat kerja menunjukkan bahwa K3 belum dipahami sebagai sistem yang mengatur interaksi antara manusia, alat, dan lingkungan kerja secara holistik.

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian (Rifani et al., 2018) yang menemukan adanya kesenjangan pemahaman antara pemilik UMKM dan konsep K3 yang ideal. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pemilik usaha sering kali menilai lingkungan kerja sudah aman berdasarkan standar subjektif, sementara aspek keselamatan yang bersifat prosedural dan preventif belum menjadi perhatian. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa hasil penelitian di Ruteng memperkuat temuan sebelumnya mengenai dominasi penilaian subjektif pemilik dalam menentukan tingkat keselamatan kerja. Dengan demikian, tantangan penerapan K3 pada UMKM tidak hanya terletak pada fasilitas fisik, tetapi juga pada cara pemilik memaknai risiko dan keselamatan kerja.

Budaya kerja kekeluargaan yang kuat dalam UMKM juga memainkan peran penting dalam membentuk perspektif pemilik usaha terhadap K3. Hubungan kerja yang dekat dan informal sering dipandang sebagai jaminan keselamatan karena pemilik merasa dapat langsung mengingatkan dan mengoreksi pekerja. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki keterbatasan struktural. Tanpa aturan dan prosedur yang jelas, keselamatan kerja sangat bergantung pada kesadaran individu dan keberadaan pemilik di lokasi kerja. Ketika beban kerja meningkat atau pemilik tidak hadir secara langsung, standar keselamatan menjadi tidak konsisten. Dalam konteks ini, budaya kekeluargaan justru berpotensi menormalisasi risiko kerja karena dianggap sebagai bagian dari dinamika kerja bersama.

Penelitian terdahulu oleh (Djiko, 2025) juga menyoroti bahwa budaya kekeluargaan dalam UMKM sering kali menghambat formalitas penerapan K3 karena dianggap bertentangan dengan nilai kebersamaan dan fleksibilitas. Temuan ini relevan dengan hasil penelitian saat ini yang menunjukkan bahwa pemilik UMKM belum melihat urgensi pembakuan K3 dalam bentuk aturan tertulis. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa penguatan K3 pada UMKM tidak dapat dilepaskan dari pendekatan budaya, di mana formalitas K3 perlu dirancang secara adaptif agar tidak dipersepsikan sebagai ancaman

terhadap nilai kekeluargaan, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan usaha bersama.

Secara konseptual, perspektif pemilik UMKM yang melihat K3 sebagai tanggung jawab individual pekerja juga menjadi faktor penghambat penerapan K3 yang optimal. Ketika keselamatan kerja dipersepsikan sebagai urusan kehati-hatian pribadi, maka tanggung jawab struktural pemilik dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman menjadi kabur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik lebih menekankan pentingnya pekerja untuk berhati-hati daripada membangun sistem yang meminimalkan risiko secara kolektif. Pola ini menguatkan temuan (Putri & Fadhillah, 2023) yang menyatakan bahwa dalam banyak UMKM, K3 masih diposisikan sebagai etika kerja individu, bukan sebagai bagian dari tata kelola organisasi. Konsekuensinya, upaya pencegahan risiko menjadi tidak sistematis dan sulit dievaluasi secara berkelanjutan.

Hasil penelitian juga mengindikasikan adanya peluang besar untuk peningkatan penerapan K3 dari perspektif pemilik usaha. Keterlibatan langsung pemilik dalam operasional UMKM memberikan ruang untuk intervensi K3 yang cepat dan kontekstual. Pemilik memiliki otoritas penuh untuk mengatur proses kerja, membagi tugas, dan menetapkan kebiasaan kerja. Jika perspektif pemilik terhadap K3 dapat digeser dari pendekatan reaktif menjadi preventif, maka penerapan K3 dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana namun konsisten, seperti pengaturan jam kerja yang lebih manusiawi, penggunaan alat pelindung diri pada pekerjaan tertentu, dan pembiasaan komunikasi keselamatan secara rutin. Dengan demikian, K3 tidak harus hadir sebagai sistem yang rumit dan mahal, tetapi sebagai bagian dari praktik manajerial sehari-hari yang terintegrasi dengan ritme kerja UMKM.

Pembahasan ini menegaskan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada UMKM dari perspektif pemilik usaha masih dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman konseptual, tekanan ekonomi, dan budaya kerja informal. Hasil penelitian yang didukung oleh temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tantangan utama penerapan K3 bukan hanya terletak pada ketersediaan sumber daya, tetapi pada cara pemilik usaha memaknai K3 itu sendiri. Oleh karena itu, upaya penguatan K3 pada UMKM perlu diarahkan pada perubahan perspektif pemilik usaha, dari memandang K3 sebagai beban biaya menjadi melihatnya sebagai investasi strategis untuk menjaga produktivitas, stabilitas operasional, dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

#### **4.2. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada UMKM dari Perspektif Karyawan.**

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada UMKM dari perspektif karyawan menunjukkan bahwa posisi K3 dipahami sebagai kebutuhan perlindungan kerja yang sangat penting, namun belum sepenuhnya terwujud dalam praktik kerja sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian, karyawan UMKM di Ruteng menyadari bahwa aktivitas kerja yang mereka jalani memiliki risiko keselamatan dan kesehatan yang nyata, baik berupa potensi kecelakaan kerja maupun dampak kesehatan jangka panjang akibat kondisi kerja. Kesadaran ini terbentuk dari pengalaman langsung menghadapi situasi kerja yang berisiko, seperti penggunaan alat kerja tanpa perlindungan memadai, beban kerja fisik yang tinggi, serta lingkungan kerja yang kurang mendukung kesehatan. Namun demikian, kesadaran tersebut tidak selalu diikuti dengan kemampuan atau keberanian karyawan untuk menuntut perlindungan kerja yang lebih baik. K3, dalam perspektif karyawan, sering kali diposisikan sebagai kebutuhan yang “dipahami tetapi diterima apa adanya” karena keterbatasan pilihan dan tekanan ekonomi.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa karyawan cenderung menormalisasi risiko kerja sebagai bagian dari rutinitas pekerjaan di UMKM. Risiko keselamatan dipandang sebagai konsekuensi wajar dari pekerjaan yang harus diterima demi mempertahankan mata pencaharian. Pola penerimaan ini menunjukkan adanya internalisasi risiko, di mana karyawan menyesuaikan sikap dan perilakunya untuk bertahan dalam kondisi kerja yang ada. Dalam konteks ini, K3 tidak lagi dilihat sebagai hak pekerja yang harus dijamin secara sistematis, melainkan sebagai tanggung jawab pribadi untuk lebih berhati-hati. Perspektif ini

memperkuat posisi karyawan sebagai pihak yang paling rentan dalam relasi kerja UMKM, karena perlindungan keselamatan bergantung pada kewaspadaan individu, bukan pada sistem kerja yang aman.

Berdasarkan hasil penelitian (Ilham, 2024) menyatakan bahwa pekerja UMKM dan sektor informal cenderung menerima kondisi kerja berisiko karena faktor kebutuhan ekonomi dan keterbatasan alternatif pekerjaan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa meskipun pekerja menyadari potensi bahaya, mereka tetap bertahan karena pekerjaan merupakan sumber penghasilan utama. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa hasil penelitian di Ruteng memperkuat argumen bahwa lemahnya penerapan K3 dari perspektif karyawan bukan disebabkan oleh ketidaktahuan, melainkan oleh posisi tawar pekerja yang lemah dalam struktur kerja UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kerja yang bersifat hierarkis dan kekeluargaan turut memengaruhi sikap karyawan terhadap K3. Kedekatan hubungan dengan pemilik usaha menciptakan dilema bagi karyawan dalam menyampaikan keluhan atau kebutuhan keselamatan kerja. Di lain sisi, hubungan kekeluargaan memberikan rasa nyaman dan kedekatan emosional, tetapi di sisi lain membatasi ruang karyawan untuk bersikap kritis terhadap kondisi kerja. Karyawan cenderung menghindari konflik dan memilih diam agar tidak dianggap menuntut atau tidak loyal. Akibatnya, kebutuhan K3 yang sebenarnya dirasakan oleh karyawan tidak terartikulasikan secara terbuka dan tidak masuk dalam agenda perbaikan kerja.

Fenomena ini sejalan dengan penelitian (Darmanto et al., 2020) yang menemukan bahwa pekerja UMKM sering mengalami kesenjangan antara kebutuhan keselamatan kerja dan realitas penerapannya karena kuatnya relasi sosial informal di tempat kerja. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa budaya kerja kekeluargaan sering kali membuat pekerja enggan menyoroti risiko kerja, sehingga masalah keselamatan tidak teridentifikasi secara sistematis. Keterkaitan ini memperkuat pemahaman bahwa hambatan penerapan K3 dari perspektif karyawan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural. Dengan kata lain, masalah K3 tidak selalu tampak di permukaan karena teredam oleh norma sosial yang mengutamakan harmoni dan penerimaan.

Aspek kesehatan kerja menjadi dimensi penting dalam perspektif karyawan yang sering kali terabaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan tidak hanya menghadapi risiko kecelakaan kerja, tetapi juga risiko kelelahan, nyeri fisik, dan gangguan kesehatan akibat ritme kerja yang kurang teratur. Namun, kondisi kesehatan ini jarang diposisikan sebagai isu kerja yang perlu dikelola secara kolektif. Karyawan cenderung mengelola sendiri dampak kesehatan yang dialami, misalnya dengan beristirahat seadanya atau menyesuaikan tempo kerja secara individual. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan kerja belum menjadi bagian dari sistem pengelolaan UMKM, melainkan masih dianggap sebagai urusan personal pekerja.

Hasil penelitian (Wahyuni et al., 2021) yang menyebutkan bahwa aspek kesehatan kerja dalam UMKM sering kali terabaikan karena fokus utama usaha adalah menjaga kelangsungan produksi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kelelahan kerja dan gangguan kesehatan jangka panjang jarang mendapat perhatian karena tidak berdampak langsung dan instan terhadap output usaha. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa hasil penelitian saat ini memperkuat temuan sebelumnya mengenai invisibilitas isu kesehatan kerja dalam praktik UMKM. Dampak kesehatan yang bersifat kumulatif cenderung tidak terlihat dalam jangka pendek, sehingga tidak menjadi perhatian utama pemilik usaha maupun sistem kerja.

Dari sudut pandang karyawan, minimnya sistem K3 juga berdampak pada rasa aman dan kenyamanan kerja. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa karyawan bekerja dalam kondisi ketidakpastian perlindungan, di mana keselamatan sangat bergantung pada situasi dan kebijakan informal pemilik usaha. Ketidakpastian ini membentuk sikap adaptif karyawan yang berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi kerja apa adanya. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menurunkan motivasi dan kualitas kerja, meskipun dampaknya belum selalu disadari secara langsung oleh karyawan maupun pemilik usaha.

Karyawan mungkin tetap bekerja, tetapi dengan tingkat kelelahan dan risiko yang terus menumpuk.

Perspektif karyawan terhadap K3 juga mencerminkan rendahnya literasi hak-hak keselamatan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan lebih banyak berbicara tentang “kehati-hatian” dibandingkan tentang hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat. Hal ini mengindikasikan bahwa K3 belum dipahami sebagai hak normatif pekerja, melainkan sebagai sikap moral individu. Pembahasan ini sejalan dengan penelitian oleh (Andi, 2020) yang menyatakan bahwa pekerja sektor informal cenderung tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menegosiasikan kondisi kerja, termasuk aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan demikian, lemahnya penerapan K3 dari perspektif karyawan juga berkaitan erat dengan aspek struktural ketenagakerjaan di sektor UMKM.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya potensi kesadaran laten di kalangan karyawan mengenai pentingnya K3. Kesadaran ini muncul dari pengalaman langsung menghadapi risiko dan dampak kesehatan kerja. Potensi ini dapat menjadi modal penting untuk perbaikan penerapan K3 apabila difasilitasi melalui pendekatan yang tepat. Karyawan sebenarnya memiliki pengetahuan kontekstual mengenai risiko kerja yang mereka hadapi, sehingga keterlibatan mereka dalam perumusan praktik K3 dapat meningkatkan efektivitas sistem keselamatan kerja. Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang apabila relasi kerja tetap menempatkan karyawan sebagai pihak pasif yang hanya menerima kebijakan pemilik usaha.

Pembahasan ini menegaskan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada UMKM dari perspektif karyawan masih berada dalam kondisi yang rentan dan tidak terstruktur. Karyawan memahami pentingnya K3, tetapi keterbatasan posisi tawar, budaya kerja informal, dan tekanan ekonomi membuat mereka menerima kondisi kerja berisiko sebagai realitas yang sulit diubah. Keterkaitan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kondisi ini merupakan pola umum dalam UMKM dan sektor informal, bukan fenomena yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, penguatan K3 pada UMKM perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan fasilitas atau regulasi, tetapi juga pada pemberdayaan karyawan, peningkatan literasi keselamatan kerja, serta penciptaan ruang dialog yang memungkinkan karyawan berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan pendekatan tersebut, K3 dapat dipahami dan dijalankan sebagai tanggung jawab bersama yang berkontribusi terhadap kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan UMKM dalam jangka panjang.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih berjalan secara informal dan belum terintegrasi dalam sistem pengelolaan usaha. Dari perspektif pemilik usaha, K3 dipahami sebagai bentuk kehati-hatian praktis yang disesuaikan dengan skala dan kemampuan usaha, sehingga belum dilembagakan dalam kebijakan atau prosedur kerja yang baku. Sementara itu, dari perspektif karyawan, K3 dipandang sebagai kebutuhan perlindungan kerja yang penting, namun belum terpenuhi secara optimal akibat keterbatasan sistem, budaya kerja kekeluargaan, serta lemahnya posisi tawar pekerja. Perbedaan cara pandang antara pemilik dan karyawan tersebut menimbulkan kesenjangan dalam penerapan K3, di mana keselamatan dan kesehatan kerja lebih banyak bergantung pada kesadaran individu daripada tanggung jawab kolektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa K3 pada UMKM belum diposisikan sebagai strategi manajerial untuk menjaga produktivitas dan keberlanjutan usaha, melainkan masih dianggap sebagai aspek pendukung yang bersifat sekunder.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemilik UMKM mulai memandang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai investasi jangka panjang yang mendukung keberlanjutan usaha, bukan sekadar sebagai beban biaya tambahan. Pemilik usaha perlu menyusun aturan kerja sederhana terkait K3, menyediakan perlindungan dasar yang relevan dengan risiko kerja, serta membangun komunikasi keselamatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Di sisi lain, karyawan perlu didorong untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga

keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga K3 menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dan pihak terkait sangat diperlukan melalui edukasi, pendampingan, dan sosialisasi K3 yang kontekstual bagi UMKM. Upaya kolaboratif tersebut diharapkan mampu memperkuat penerapan K3 secara realistis dan adaptif, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, R., Putri, S. A., Arifan, Y. N. M., Hidayat, R., & Ikaningtyas, M. (2024). Optimalisasi Proses Operasional dengan Menggabungkan Teknologi IoT dan Big Data : Studi Kasus pada PT Pertamina dalam Industri Minyak dan Gas Operational Process Optimization by Combining IoT and Big Data Technology : A Case Study on PT Pertamina in the O. *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, 3(1), 1–10.
- Andi, H. (2020). Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja Di Atas Kapal. *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, 2(1), 1–10.
- Arfiana, K., & Fanika, N. (2023). Implementasi Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam Penggunaan Laboratorium IPA. *Indonesian Journal of Laboratory*, 8(1), 74–93.
- Ayu, A. P., & Dalimunthe, N. (2023). Pengaruh Perubahan Teknologi Terhadap Regulasi Hukum Ketenagakerjaan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 5785–5796.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Mixed Methods Procedures. In *Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research Design : Qualitative, Quantitative, and A Mixed-Method Approach. In *SAGE Publication*. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Darmanto, S., Ridwan, M., Hartono, H., & Nugroho, A. (2020). Peningkatan Produktifitas dan Keselamatan Kerja Industri Pande Besi dengan Mengaplikasikan Rak Penyimpanan “Peralatan, Benda Kerja dan Bahan Lain.” *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat UNDIP 2020*, 641–644.
- Djiko, A. M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Diperusahaan PT.HNM (Nusa Halmahera Mineral) Gosowong atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja. *Jurnal Ilmu Multidisipliner*, 01(02).
- Firman Isnain, A. (2022). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dengan Metode Hazard Identification Risk Assessment And Determining Control .... *Journal of Geomintech*, 7(2), 10–16. [http://repository.pnb.ac.id/3052/%0Ahttp://repository.pnb.ac.id/3052/2/RAMA\\_22302\\_1815124081\\_0024066505\\_0026066709\\_Part.pdf](http://repository.pnb.ac.id/3052/%0Ahttp://repository.pnb.ac.id/3052/2/RAMA_22302_1815124081_0024066505_0026066709_Part.pdf)
- Ilham, M. R. (2024). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Di Disnakertransgi Dki Provinsi Jakarta). *Yustisi*, 11(2), 220–230. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/16677>
- Parinduri, L., & Parinduri, T. (2021). Implementasi Manajemen Keselamatan Konstruksi Dalam Pandemi Covid 19. *Jurnal Teknik Sipil*, 2(2), 2021. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/2836>

- Puspayanti, A., Lasmawan, I. W., & Suharta, I. G. P. (2023). Konsep Tri Hita Karana untuk Pengembangan Budaya Harmoni melalui Pendidikan Karakter. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 11(1), 87–98. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v11i1.314>
- Putri, D. P., & Fadhillah, I. (2023). Peran Safety Management Code Dalam Mengoptimalkan Keselamatan Kerja Crew Kapal MV Pekan Fajar. *Innonative: Journal of Science Research*, 3(4), 1913–1927.
- Rifani, Y., Mulyani, E., & Riyanny, P. (2018). Penerapan Konstruksi Dengan Menggunakan Metode HIRARC Pada Pekerjaan Akses Jalan Masuk. *Jurnal Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjungpura*, v(3), 1–12.
- Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2020). Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 127–144. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/27351>
- Sugiono, prof. D. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*. ALFABETA, cv.
- Wahyuni, A. A. I. S., Wahdiana, D., Hasugian, S., & Paramitha, A. A. I. S. B. (2021). Analisis Human Error terhadap penggunaan Peralatan Komunikasi dan Navigasi Kapal Sebagai Penyebab Kecelakaan Kerja Sereati Hasugian , 4 Anak Agung Istri Sinta Bela Paramitha. *Jurnal Ilmiah Rekam Medis Dan Informatika Kesehatan*, 11(1), 59–64.
- Wardasyifa, I. (2024). Kontribusi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari UUD 1945 dan NKRI dalam Penerapan Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja (K3) dan Corporate Social Responsibility di PT Aqua Golden Mississippi. *SAMMAJIVA: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 43–63.